



JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE MANAGEMENT (JAFM)

E-ISSN : 2721-3013
P-ISSN : 2721-3005<https://dinastires.org/JAFM>dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4>Received: September 12th 2024, Revised: September 19th 2024, Publish: September 27th 2024<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hubungan Politik Utang Indonesia dan China Untuk Menghindari Debt Trap Diplomacy

Zhafarina Jauza Az Zahro¹, Faris Al-Fadhat², Andy Prasetiawan Hamzah³¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, z.jauza.isip21@mail.umy.ac.id²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia farisalfadh@umy.ac.id³Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia, andy_hamzah@pknstan.ac.idCorresponding Author: z.jauza.isip21@mail.umy.ac.id¹

Abstract: *The analysis of the political relationship of Indonesia's debt to China to avoid debt trap diplomacy discusses the political debt relationship between Indonesia and China, particularly considering the intensive cooperation and debt assistance that China has provided to Indonesia, as well as the establishment of loan condition regulations that threaten the use of the state budget as a payment tool. This writing aims to understand the development of Indonesia's debt to China, whether Indonesia is trapped in a Debt Trap, and how Indonesia can avoid Debt Trap Diplomacy. This research employs a qualitative descriptive analysis method, utilizing previously published sources with data collection sourced from books, journals, and other online media such as websites, databases, and information available on the internet. Based on dependency theory, it shows that loan conditions with high interest rates and strict repayment terms reflect unfavorable lending conditions. The increase in debt to China for the Indonesian economy can stimulate the country's growth, but a significant economic dependence can also make Indonesia more vulnerable to Debt Trap Diplomacy. The research results indicate that based on the analysis of Indonesia's debt to China, there has been a tendency for an increase over the past five years. Indonesia is also still in a position of safe debt ratios, both by national and global standards, and does not fall into the category of Debt Trap Diplomacy. Several steps, approaches, and diplomatic efforts have also been undertaken by Indonesia to avoid Debt Trap Diplomacy.*

Keyword: *Indonesia, China, Debt Trap Diplomacy, Foreign Policy, Dependency*

Abstrak: Analisis Hubungan Politik Utang Indonesia Dan China Untuk Menghindari Debt Trap Diplomacy membahas tentang hubungan politik utang antara negara Indonesia dan China, terutama mengingat intensifnya kerja sama dan bantuan utang yang telah dilakukan oleh China kepada Indonesia dan penetapan peraturan persyaratan pinjaman yang mengancam penggunaan jaminan APBN sebagai alat pembayaran. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan utang Indonesia kepada China, apakah Indonesia terjebak dalam *Debt Trap*, dan bagaimana Indonesia dapat menghindari *Debt Trap Diplomacy*. Penelitian ini

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, menggunakan sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan media *online* lainnya seperti *website-website*, *database*, dan informasi yang tersedia di internet. Berdasarkan teori ketergantungan, menunjukkan bahwa kondisi pinjaman dengan suku bunga yang tinggi dan persyaratan pembayaran yang ketat mencerminkan kondisi pinjaman yang tidak menguntungkan. Peningkatan utang kepada China terhadap perekonomian Indonesia dalam dapat memacu pertumbuhan negara, tetapi ketergantungan ekonomi yang besar juga dapat membuat Indonesia lebih rentan terhadap *Debt Trap Diplomacy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis utang Indonesia terhadap China cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir, Indonesia juga masih berada dalam posisi rasio utang yang aman baik secara standar nasional maupu global dan Indonesia tidak masuk ke dalam kategori *Debt Trap Diplomacy*. Beberapa langkah, pendekatan, dan upaya diplomasi juga telah dilakukan Indonesia sebagai untuk menghindari Debt Trap Dilomacy.

Kata Kunci: Indonesia, China, Diplomasi Jebakan Utang, Kebijakan Luar Negeri, Ketergantungan

INTRODUCTION

Era Presiden Jokowi, hubungan politik utang yang dimiliki negara Indonesia dan China semakin hari intensitasnya semakin intensif dalam hal utang. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang melibatkan bantuan pembiayaan dari China. Pada November 2014, kesepakatan yang dihasilkan dari kunjungan Indonesia ke Beijing pada kala itu menyatakan untuk berkomitmen untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dipimpin China. AIIB sendiri merupakan lembaga keuangan internasional yang dipimpin China yang secara khusus dibentuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini juga didukung dengan keterlibatan China dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China (Idris 2023).

China menawarkan pembiayaan kereta cepat tanpa APBN ditambah tidak adanya jaminan dari pemerintah. Komposisi pembiayaan proyek kereta cepat sebanyak 75% berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China. Dalam pembagiannya Konsorsium BUMN menyumbang 60% sedangkan 40% bersumber dari Konsorsium China. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa total untuk pinjaman Indonesia ke China Development Bank mencapai 3.8 triliun dengan bunga 3.4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun (BBC News Indonesia 2023).

Teori Dependency menurut Theotonio Dos Santos and Andre Gunder Frank dalam menganalisis utang Indonesia-China memberikan gambaran bahwa China sebagai negara maju berusaha menciptakan siklus ketergantungan dan meningkatkan pengaruh politiknya pada negara berkembang. Berdasarkan analisis yang menunjukkan kondisi pinjaman dengan bunga yang tinggi serta persyaratan pembayaran yang ketat mencerminkan kondisi pinjaman yang tidak menguntungkan.

Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh China. Namun, proyek ini telah mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga berdampak pada biaya proyek yang meningkat. Kegagalan tercermin dari terjadinya *cost overrun* (kelebihan biaya) pada proyek KCJB, hal ini dibuktikan dengan biaya awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 6,07 miliar dolar AS, atau setara Rp 86,5 triliun, meningkat menjadi 8 miliar dolar AS, atau setara Rp 114,24 triliun. Selain itu, diperparah dengan mundurnya target penyelesaian kereta cepat akibat Covid-19 (Sari 2022).

Analisis mengenai hubungan politik utang Indonesia dengan China sekilas memberikan gambaran bahwa utang yang dilakukan pemerintahan Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional berperan penting pada berbagai aspek pertumbuhan ekonomi. Namun, utang dapat menjadi ancaman bagi negara dikarenakan penetapan peraturan persyaratan pinjaman yang mengancam penggunaan jaminan APBN sebagai alat bayar. Mengingat bahwa pengeluaran belanja APBN salah satu komponennya diperuntukkan membayar bunga utang untuk memenuhi kewajiban keuangan negara yang timbul dari pinjaman yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Belt and Road Initiative (BRI) China dalam proyek pembiayaan infrastruktur memiliki peran penting dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. BRI adalah proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran yang diprakarsai oleh China untuk menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui jaringan sistem transportasi, energi, dan telekomunikasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di antara negara-negara yang berpartisipasi dan mempromosikan kepentingan ekonomi (Al-Fadhat and Prasetyo 2022).

Konsep *Debt Trap Diplomacy* diawali oleh China yang sengaja memberikan pinjaman pada suatu negara yang perekonomiannya dianggap sulit untuk menghasilkan keuntungan ekonomi dalam waktu cepat yang ditetapkan China untuk membayar utang. Dalam mengartikan *Debt Trap Diplomacy*, pada negara peminjam mayoritas berasal dari negara berkembang. Dengan menganggap Upaya bantuan dalam bentuk utang sebagai langkah untuk menundukan negara peminjam, eksploitasi sumber daya alam, maupun konsesi yang diusung oleh China. Secara bersamaan Debt Trap yang dilakukan oleh China dapat dikategorikan sebagai upaya *Debt Trap diplomacy* karena hal ini bergantung pada kesepakatan apa yang dilakukan antara China dengan negara peminjam untuk membayar utang terkait apa yang menjadi jaminan untuk membayar utang pinjaman China (Hao 2022).

Debt Trap Diplomacy dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian ekonomi negara peminjam. Kondisi ketergantungan dapat membatasi ruang fiskal kebijakan dan pilihan kebijakannya, hal ini juga berlaku bagi negara Indonesia dimana jika Indonesia mengalami kondisi ketidakmampuan membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh China maka Indonesia harus menerima konsekuensi akan persyaratan yang tidak menguntungkan. Persyaratan tersebut bisa berupa pengalihan aset strategis atau konsesi politik, seperti yang terjadi pada negara-negara yang telah masuk ke dalam jebakan utang China.

Berbagai kegiatan kerja sama dan juga bantuan utang dari China dalam berbagai aspek tentunya menimbulkan dampak positif bagi keuntungan kedua belah pihak negara. Namun, dari adanya kerja sama ini juga memiliki dampak bagi kelangsungan negara, terutama mengenai kesepakatan yang telah dibuat pada awal dimulainya kerja sama.

Penelitian Studi Lowy Institute menunjukkan bahwa China membelanjakan 37,9 miliar dolar AS untuk pembangunan di Asia Tenggara antara tahun 2015 dan 2021. Indonesia menerima paling banyak dana, sebesar 15,1 miliar dolar AS; Laos menempati urutan kedua, sebesar 6,48 miliar dolar AS, dan Malaysia menempati urutan ketiga, sebesar 4,96 miliar dolar AS (Dikarma 2023).

Contoh negara yang telah masuk ke dalam Debt Trap China beberapa diantaranya berasal dari negara kawasan Afrika dan juga negara Sri Lanka. Banyak pengamat yang menyatakan bahwa Sri Lanka sebagai negara yang telah terkena jebakan utang. Posisinya yang sangat penting di jalur perdagangan maritim membuat China ingin melakukan kerja sama dengan negara Sri Lanka (Kenepri 2023). Berawal dari pembangunan proyek kerja sama pembangunan 'Bandara Internasional Mattala Rajapaksa' Sri Lanka yang dibangun dari bantuan pinjaman negara China, yang kemudian mengalami kegagalan akibat tidak mampu memberikan hasil setelah setahun beroperasi.

Kasus negara Sri Lanka membuat China mengharapkan untuk menjual 80% saham di Pelabuhan Hambantota kepada China dengan harga 1,12 miliar USD dan masa sewa selama 99

tahun. Selain itu, Sri Lanka juga setuju untuk memberikan China kepemilikan saham kontrol di pelabuhan dan masa sewa selama 99 tahun untuk dioperasikan oleh China (Wibisono 2019). Karena beberapa proyek yang telah dibuka tidak dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi negara Sri Lanka, Oleh karena itu, pemerintah Sri Lanka harus berpikir keras untuk mencari cara untuk melunasi hutang yang terus meningkat setiap tahunnya.

Negara kawasan Afrika juga mengalami jebakan utang, contohnya pada negara Zimbabwe. Negara yang memiliki kebutuhan yang besar untuk melakukan pembangunan menjadikan bantuan berupa investasi China sebagai jalan keluar. Jumlah utang Zimbabwe (baik dari dalam maupun luar negeri) terus meningkat mencapai US\$18 miliar pada tahun 2018, dan 34% dari utang luar negeri ini hanya berasal dari Cina, didukung dengan pinjaman lunak Zimbabwe dari negara lain di mana 80% berasal dari Cina. Hal ini merepresentasikan besarnya ketergantungan Zimbabwe kepada negara China dan pengaruh negara China terhadap perekonomian negara Zimbabwe (Al-Fadhat and Prasetyo 2022).

Negara Uganda juga 'menyerahkan' satu-satunya bandara internasionalnya pada negeri Tirai Bambu. Bandara Internasional Entebbe yang merupakan satu-satunya bandara internasional Uganda yang menangani lebih dari 1,9 juta penumpang per tahun (Arbar 2022). Ketidakmampuan Uganda dalam membayar utang kepada China membawa Uganda ke dalam kondisi *Debt Trap*. Pada proyek pengembangan infrastruktur Uganda pada Bandara Internasional Entebbe menerima pinjaman dari China dimana Bank Exim China yang memberikan pinjaman sebesar US\$ 207 juta dengan tenor 20 tahun (Damayanti 2021).

Sri Lanka memberikan bagian mayoritas dari pelabuhan pada sewa 99 tahun ke China Merchants Port Holdings Company (Carmody 2020). Pada negara kawasan Afrika, pada negara Zimbabwe penggunaan yuan sebagai mata uangnya sebagai upaya yang dilakukan untuk mempermudah menghapus utang-utangnya akibat ketergantungan yang besar terhadap negara China. Kemudian bukti *debt trap* pada negara Uganda juga direpresentasikan dengan jatuhnya kepemilikan dan otoritas bandara internasional Entebbe kepada negara China akibat kegagalan dama pembayaran utang (Alden 2020). Hal ini merupakan bukti Intervensi China yang tidak dapat ditolak terhadap negara yang telah terkena jebakan utang.

Kasus dari negara-negara yang telah terkena jebakan utang ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang terkena *Debt Trap Diplomacy*. Negara-negara yang telah terjebak dalam '*Debt Trap*' menghadapi kondisi yang semakin buruk, seperti impor melebihi ekspor, pengeluaran yang melebihi pendapatan, dan sebagainya. Hubungan antara Indonesia dan China dari segi utang secara langsung telah menimbulkan kekhawatiran akan jebakan *debt trap* China terlebih melihat kerja sama dan bantuan intensif yang telah dilakukan negara China pada Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan utang Indonesia kepada China, apakah Indonesia terjebak dalam *Debt Trap*, dan bagaimana Indonesia dapat menghindari *Debt Trap Diplomacy*.

METHOD

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan jenis eksplanatif. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan Teknik merangkum data yang telah terkumpul untuk kemudian disusun dengan mengkategorikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan memberikan pembahasan yang utuh secara naratif.

Eksplanatif adalah metode pemecahan masalah yang menjelaskan rincian fenomena dan sebab akibat dari suatu penelitian dengan dukungan berbagai data dan fakta yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis internet seperti; *Mendeley*, *Research Gate*, *Google Scholar*, dan sumber-sumber data elektronik berbasis internet lainnya.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari buku, jurnal dan media online

lainnya seperti situs web, *database*, dan informasi yang tersedia di internet, untuk mengumpulkan data.

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2024, dapat diketahui jumlah utang luar negeri Indonesia per 31 Desember 2023 sebesar 204.578 Juta USD. Utang ini meliputi 21 pihak sebagai kreditor.

Data utang Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Posisi Utang Luar negeri Menurut Kreditor dalam Juta USD

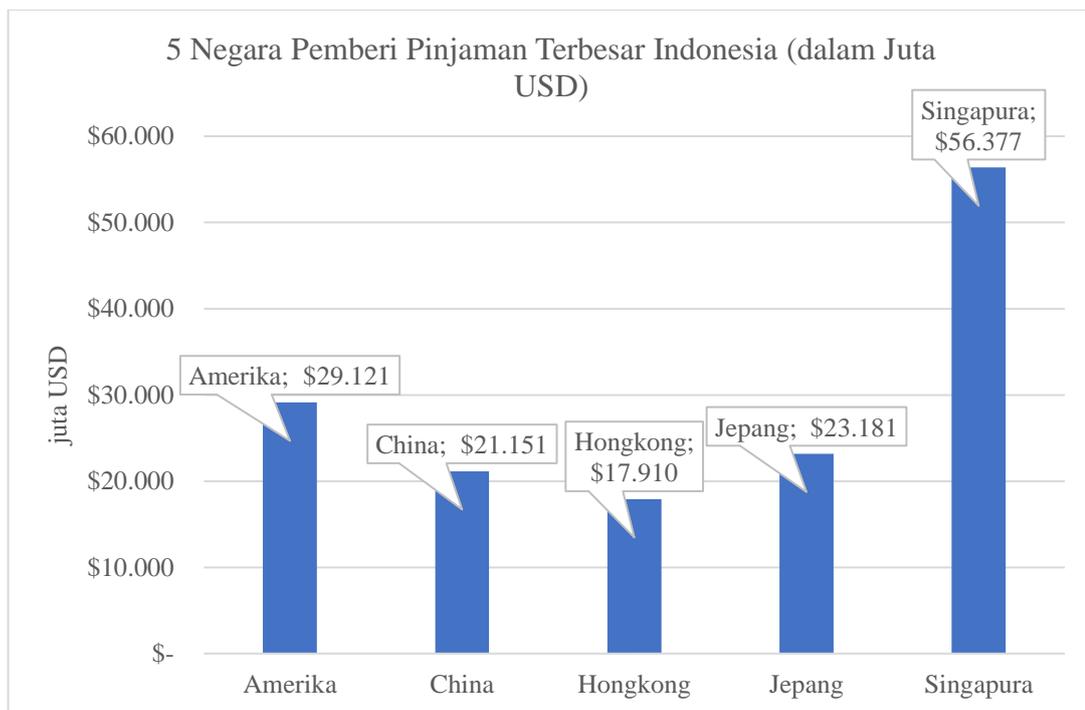
Negara	2019	2020	2021	2022	2023	Kenaikan dalam 5 tahun
Singapura	69.366	68.857	61.153	59.305	56.377	-19%
Amerika	21.388	29.914	31.908	32.667	29.121	36%
Jepang	28.935	28.205	26.970	24.336	23.181	-20%
China	19.997	20.652	20.894	20.118	21.151	6%
Hongkong	11.912	13.330	17.192	18.566	17.910	50%
Asia lainnya	11.104	10.451	10.270	10.723	10.514	-5%
Korea Selatan	6.104	6.031	5.914	6.322	8.635	41%
Jerman	4.437	5.547	5.295	5.276	5.372	21%
Amerika lainnya	4.347	4.822	4.765	4.092	5.238	20%
Perancis	3.787	4.293	3.949	3.997	5.186	37%
Belanda	6.970	5.908	5.534	4.893	4.717	-32%
Inggris	3.879	3.889	3.687	2.835	3.858	-1%
Eropa lainnya	2.893	3.029	2.994	2.837	3.441	19%
Sindikasi - Negara-negara	6.483	5.846	5.660	4.367	2.944	-55%
Australia	1.093	2.245	2.012	2.002	1.910	75%
Swiss	1.858	1.932	1.779	1.659	1.809	-3%
Austria	408	415	431	553	639	57%
Afrika	776	796	494	666	224	-71%
Spanyol	309	266	246	149	150	-51%
Belgia	104	62	99	111	124	19%
Oceania	21	29	44	58	54	157%
Total	208.190	218.539	213.311	207.554	204.578	

Sumber: (Diolah dari data Kementerian Keuangan, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) 2024)

Tabel 1: menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia menurut kreditor berdasarkan edisi terbaru dokumen Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Juli 2024 yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan. Tabel tersebut berisi data posisi utang Indonesia menurut 21 negara/pihak sebagai kreditor. Meskipun utang Indonesia terhadap China sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, namun dari data tersebut memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir terdapat kenaikan utang hampir setiap tahunnya terhadap utang luar negeri Indonesia pada China sebagai kreditor. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa China menempati urutan keempat dalam kategori pemberi utang terbanyak negara Indonesia. Dan dalam lima tahun terakhir presentasi kenaikan utang Indonesia terhadap China sebesar 6%

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2024, dapat diketahui pula Lima Negara Pemberi Pinjaman Terbesar Indonesia per 31 Desember tahun 2023. Lima negara pemberi pinjaman terbesar meliputi Singapura, Amerika, Jepang, China dan Hongkong. Data Lima Negara Pemberi Pinjaman Terbesar Indonesia (dalam Juta USD Tabel 2.

Tabel 2. Lima Negara Pemberi Pinjaman Terbesar Indonesia (dalam Juta USD)



Sumber: (Diolah dari data Kementerian Keuangan, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) 2024)

Tabel 2; posisi lima negara sebagai kreditor, persentase kenaikan utang Indonesia terhadap China yang hanya naik sebesar 6% dari tahun 2019 ke tahun 2023 sehingga berjumlah 21.151 juta US\$ per 31 Desember 2023. Singapura memiliki persentase kenaikan yang lebih besar dibandingkan negara China pada urutan pertama. Sehingga, meskipun utang yang dilakukan China sekilas terlihat intensif, utang paling besar Indonesia adalah kepada negara Singapura dengan total pada tahun 2023 sebesar 56.377 US\$.

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Meskipun perkembangan utang Indonesia terhadap China sempat mengalami fluktuatif dan cenderung naik selama lima tahun terakhir. China menempati urutan keempat dalam posisi negara sebagai pihak pemberi pinjaman terbesar menurut kreditor.

Debt Trap Diplomacy

Hubungan Indonesia dengan negara China berlangsung sangat intensif selama kurang lebih 70 tahun, yang dimulai sejak 1950. Pada era Presiden Joko Widodo, hubungan ini melihat perkembangan peningkatan kerja sama yang semakin intensif, terutama dalam ekonomi pada investasi ataupun perdagangannya. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 36 MoU baru Indonesia-China di era Presiden Joko Widodo, dan negara yang pertama kali dikunjungi Jokowi pada 8 November 2014 di awal masa jabatannya (Fauziyyah and Paksi 2023).

Visi dan misi yang sejalan dengan tujuan politik luar negeri presiden negara Indonesia terkait upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dalam cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dapat dilihat bahwa kerja sama Investasi kemudian bantuan China dari adanya kebutuhan pembangunan negara melalui percepatan pembangunan infrastruktur meningkatkan bagaimana besar dan intensifnya pemberian bantuan berupa hutang dari China dalam bentuk investasi.

Faktor lain yang mendorong peningkatan hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan China tercipta dari adanya kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan politiknya. Indonesia telah berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi dan politiknya dengan bantuan dalam sektor infrastruktur, energi, dan pertanian. China telah menjadi mitra kerja sama yang penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuan ini. Contohnya, proyek terbaru infrastruktur seperti Jakarta-Bandung High Speed Rail.

Peningkatan hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan China dalam beberapa dekade terakhir dipengaruhi oleh kepentingan strategis China dalam meningkatkan kekuatan ekonomi dan politiknya di Asia Tenggara dan kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan politiknya.

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan China sering menggunakan utang dalam bentuk bantuan pinjaman. Pinjaman ini yang digunakan sebagai upaya mendorong pembangunan negara Indonesia. Selama 10 tahun terakhir hubungan kerja sama Indonesia dan China semakin intensif terutama dalam kerja sama ekonomi. Secara umum interdependensi merupakan tujuan dari adanya kerja sama bilateral. Suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lain secara timbal balik karena adanya ketergantungan satu sama lain. Jika satu negara merasa lebih membutuhkan dibandingkan negara yang bekerja sama, yang tercermin dari hubungan politik utang Indonesia dengan China.

Teori Dependency (Dependency Theory) menurut Theotonio Dos Santos and Andre Gunder Frank dalam memahami kerja sama ekonomi dengan pemberian bantuan berupa utang dapat menyebabkan negara berkembang seperti Indonesia semakin bergantung kepada negara China sebagai negara maju. Hal ini dapat mengurangi independensi politik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Indonesia sebagai negara yang berperan menerima pinjaman, dalam menjaga akses bantuan pinjaman tersebut perlu menjaga hubungan baik dengan negara China sebagai pemberi bantuan pinjaman. Peningkatan utang dari adanya kerja sama Indonesia China pada skema pembangunan infrastruktur juga secara tidak langsung menciptakan pola ketergantungan yang membuat Indonesia harus mengikuti kebijakan China untuk mendapatkan bantuan ekonomi, yang dapat mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengambil keputusan ekonomi yang independen.

Debt-trap Diplomacy dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian ekonomi negara peminjam dengan cara ketergantungan ekonomi, jebakan utang, kehilangan kedaulatan negara, kemandirian ekonomi, dan ketergantungan politik. Bercermin dari negara-negara yang telah menjadi korban jebakan utang China, dimana China memiliki kontrol yang besar terhadap proyek-proyek infrastruktur dan energi yang dibangun di negara peminjam (Al Ghifari 2024). Selain itu, hal ini juga mengancam kemandirian ekonomi yang dapat hilang ketika negara peminjam tidak dapat memutuskan ketergantungan pada pemberi pinjaman. Secara langsung memberi dampak pada kedaulatan negara yang dapat hilang ketika pemberi pinjaman memiliki kontrol yang besar terhadap proyek-proyek negara tersebut.

Kondisi *Debt Trap* suatu negara dapat dikatakan masuk dalam kategori *Debt Trap Diplomacy* (DTD) jika memenuhi persyaratan suatu kondisi; 1. terjadinya transaksi keuangan dalam bentuk pinjaman China terhadap negara peminjam, 2. China dengan sengaja memberikan pinjaman kepada negara peminjam untuk mendapatkan aset strategis di masa depan, 3. Peminjam tidak memiliki potensi untuk membayar utangnya kepada China, sehingga peminjam melepaskan sebagian asetnya kepada China untuk mengurangi utangnya kepada China (Himmer and Rod 2022).

Berdasarkan data BPS, besarnya PDB tahun 2023 yaitu sebesar Rp20.892,4 Triliun atau dengan kurs Rp15.275 dapat dihitung PDB sebesar 1.367.751,23 Juta US\$ (Badan Pusat Statistik 2023). Perbandingan antara total utang 2023 sebesar 204.578 pada Tabel 2 terhadap total PDB dalam sebesar 1.367.751,23 juta USD menghasilkan rasio utang terhadap PDB Tahun 2023 sebesar 15 %. Total utang terhadap PDB 2023 menunjukkan bahwa rasio utang terhadap PDB sebesar 15% pada tahun 2023 mencerminkan rasio utang yang dimiliki negara Indonesia masih dalam kondisi yang aman.

Tercantum dalam peraturan perundang undangan No. 17 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 3 “Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto” (Pemerintah RI 2003). Berdasarkan peraturan tersebut persentase rasio utang Indonesia masih dalam batas aman. Secara global berdasarkan Policy Research Working Paper World Bank diterapkan standar untuk negara maju ambang batas rasio utang publik terhadap PDB sebesar 77%, dan untuk

negara berkembang sebesar 64% (Caner, Mehmet 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa Rasio utang sebesar 15% yang dimiliki Indonesia secara global masih dalam keadaan aman dalam kemampuan membayar utang.

Tabel 3. Total Utang Terhadap PDB 2023

PDB 2023	PDB Rupiah	Kurs	Total PDB dalam Juta USD
	2E+16	15275	1.367.751,23

% Total Utang thd PDB Tahun
2023

15%

Sumber: (Kementerian Keuangan 2024)

Untuk mengetahui apakah Indonesia masuk kategori *Debt Trap Diplomacy* (DTD), kita dapat melakukan analisis berdasarkan 3 indikator. Indikator pertama pada kategori *Debt Trap Diplomacy*, Indonesia telah melakukan transaksi dalam bentuk pinjaman dari negara China. Indikator kedua, China dengan sengaja memberikan pinjaman kepada negara peminjam untuk mendapatkan aset strategis di masa depan, namun pada kasus negara Indonesia sebatas terancamnya penggunaan APBN sebagai alat bayar dan tidak ada aset strategis yang harus diserahkan di masa yang akan datang. Indikator ketiga Indonesia dengan rasio utang yang masih dalam kategori aman baik secara standar nasional maupun global masih memiliki potensi untuk membayar utangnya kepada China. Sehingga berdasarkan analisis Indikator *Debt Trap Diplomacy* (DTD) di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak masuk kedalam kategori terkena *Debt Trap Diplomacy*.

Indonesia dalam Menghindari ‘Debt Trap Diplomacy’

Strategi yang telah dilakukan pemerintah untuk menghindari *debt trap*, yang setidaknya dilakukan dengan beberapa cara. Strategi pertama dengan melakukan pengelolaan utang jangka menengah (lima tahunan), dan strategi pengelolaan utang tahunan. Strategi menengah ini telah ditetapkan sesuai aturan yang dituangkan pada Menteri Keuangan (KMK) Nomor 514/KMK.08/2010 (2010 - 2014) (Strategi Pemerintah Kelola Utang Negara 2012). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan memaparkan bahwa Beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia tersebut tercermin pada 6 langkah, yaitu: 1) Meningkatkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah dan penarikan pinjam dalam negeri melalui penerbitan SBN Rupiah yang rutin diterbitkan oleh pemerintah dan penarikan pinjaman dan bank domestik seperti penarikan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, 2) Mengembangkan instrumen utang untuk memberikan fleksibilitas dalam memilih instrumen yang paling sesuai dan mengurangi risiko melalui penerbitan SBN dengan tenor jangka panjang, pendek, dan jangka menengah sebagai pilihan bagi para investor, 3) Pengadaan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan kondisi wajar dan tanpa agenda politik dari kreditur implementasinya pada penerapan kerja sama dengan World Bank untuk mendapatkan pinjaman yang digunakan demi meningkatkan kualitas pendidikan sebagai kebutuhan prioritas, 4) Menjaga kebijakan pengembangan utang yang konsisten melalui evaluasi berkala strategi pengelolaan utang, 5) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan pasar modal melalui koordinasi pengelolaan utang secara berkala bersama oleh perwakilan pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 6) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan utang yang sehat dan manfaat investasi dalam SBN melalui *platform digital*.

Selain itu, ada pendekatan khusus untuk mengelola utang negara, seperti meningkatkan likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik, menurunkan biaya pinjaman dengan memilih pemberi pinjaman yang tepat, meningkatkan proses bisnis dan interaksi dengan *stakeholder*,

dan meningkatkan kualitas penyerapan pinjaman. Strategi pada kebijakan untuk menghindari *Debt Trap Diplomacy* China secara makro, melalui 2 strategi. Pertama, Untuk menghindari '*Debt Trap*' pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan bantuan utang tersebut misalkan pada proyek kereta cepat jakarta-bandung di mana ada keterlibatan pemerintah dan swasta, dengan demikian baik China maupun Indonesia sama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Dengan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Kedua, Indonesia telah melakukan upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan kesepakatan tenor sesuai perjanjian awal untuk menurunkan bunga pinjaman menjadi 2% dengan tenor selama 40 tahun - yang merupakan skema pembiayaan awal. Meskipun kesepakatan tetap jatuh pada bunga yang harus dibayar yang ditawarkan oleh China sebesar 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun. (BBC News Indonesia 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya bagaimana cara menghindari *Debt*.

CONCLUSION

Posisi utang luar negeri Indonesia per 31 Desember 2023 terbesar 204.578 juta US\$ dengan negara Singapura sebagai pemberi pinjaman terbanyak. China sebagai kreditor terbesar keempat Indonesia berdasarkan posisi lima negara sebagai kreditor, persentase kenaikan utang Indonesia terhadap China yang hanya naik sebesar 6% dari tahun 2019 ke tahun 2023 sehingga berjumlah 21.151 juta US\$. Sehingga, meskipun utang yang dilakukan China sekilas terlihat intensif, utang paling besar Indonesia adalah terhadap negara Singapura dengan total pada tahun 2023 sebesar 56.377 US\$.

Indikator kategori *Debt Trap Diplomacy* (DTD), berdasarkan hasil analisis hubungan politik utang Indonesia terhadap China masih masuk ke dalam kondisi yang aman. Hal ini dibuktikan bahwa tidak ada aset strategis yang harus diserahkan di masa yang akan datang, dan Indonesia masih berada dalam posisi rasio utang yang aman baik secara standar nasional maupun global dan masih memiliki potensi untuk bisa membayar utangnya kepada China. Rasio utang terhadap PDB sebesar 15% masih di bawah persentase maksimal yang direkomendasikan 64% untuk negara berkembang, dan juga sesuai dengan UU 17 tahun 2003. Sehingga berdasarkan analisis Indikator *Debt Trap Diplomacy* (DTD) di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam kategori terkena *Debt Trap Diplomacy*.

Berkaca dari negara yang telah masuk ke dalam *debt trap* China, Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi resiko sebagai upaya menghindari *debt trap* diantaranya adalah yang tertuang dalam Menteri Keuangan (KMK) Nomor 514/KMK.08/2010, yaitu: 1) Meningkatkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah dan penarikan pinjam dalam negeri, 2) Mengembangkan instrumen utang untuk memberikan fleksibilitas dalam memilih instrumen yang paling sesuai dan mengurangi risiko, 3) Pengadaan pinjaman luar negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dengan kondisi wajar dan tanpa agenda politik dari kreditor. Menjaga kebijakan pengembangan utang yang konsisten, 4) Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan pasar modal, 5) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman, dan beberapa pendekatan serta upaya diplomasi.

REFERENCE

- Al-Fadhat, Faris, and Hari Prasetyo. 2022. "Debt-Trap Diplomacy: Bagaimana Ekspansi Kapital China Membentuk Jebakan Utang Bagi Negara-Negara Afrika." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 18(2): 150–76. doi:10.26593/jihi.v18i2.5262.150-176.
- Alden, Chris. 2020. "Understanding Debt and Diplomacy." : 1–14. https://eprints.lse.ac.uk/110974/1/WorkingPaper01_FIN_04indd.pdf.
- Arbar, Thea Fathanah. 2022. "5 Negara Disebut Kena 'Jebakan Batman' Utang China, Ada

- RI?” www.cnbcindonesia.com: 1–4.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220420063224-4-333013/5-negara-disebut-kena-jebakan-batman-utang-china-ada-ri>.
- Badan Pusat Statistik. 2023. No. 34/05/ Www.Bps.Go.Id *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen--y-on-y-.html>.
- BBC News Indonesia. 2023. “Bunga Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung 3,4%, Jebakan Utang China?” <https://www.bbc.com/>: 1.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72vg2v5732o>.
- Caner, Mehmet, dkk. 2010. “*Finding the Tipping Point—When Sovereign Debt Turns Bad.*” Latin America and the Carribean Region. <https://documents1.worldbank.org/curated/ru/509771468337915456/pdf/WPS5391.pdf>.
- Carmody, Pádraig. 2020. “Dependence Not Debt-Trap Diplomacy.” *Area Development and Policy* 5(1): 23–31. doi:10.1080/23792949.2019.1702471.
- Damayanti, Aulia. 2021. “3 Fakta Uganda Gagal Bayar Utang Ke China Berujung Kehilangan Bandara.” <https://finance.detik.com/>. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5832520/3-fakta-uganda-gagal-bayar-utang-ke-china-berujung-kehilangan-bandara>.
- Dikarma, Kamran. 2023. “Wow, Indonesia Jadi Negara Terbesar Terima Investasi Pembangunan Dari China.” <https://ekonomi.republika.co.id/>.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvr6zn457/wow-indonesia-jadi-negara-terbesar-terima-investasi-pembangunan-dari-china>.
- Fauziyyah, Putri Zahra, and Arie Kusuma Paksi. 2023. “Dampak Kerja Sama Indonesia-China Dalam Proyek Investasi Nikel Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kedua Negara.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 7(1): 86–105. doi:10.38043/jids.v7i1.4279.
- Al Ghifari. 2024. “Debt Trap: Bahaya Tipu Daya China Bagi Kedaulatan Indonesia Di Laut China Selatan.” <https://www.kompasiana.com/>.
<https://www.kompasiana.com/algifari2670/6649ee0514709344882c7e12/debt-trap-bahaya-tipu-daya-china-bagi-kedaulatan-indonesia-di-laut-china-selatan>.
- Hao, Yichen. 2022. “Is China’s Investment A Debt Trap? -A Comparative Research Based on the Investment in the United States, Europe and China.” *Proceedings of the 2021 3rd International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2021)* 203(Icemci): 2604–10. doi:10.2991/assehr.k.211209.424.
- Himmer, Michal, and Zdeněk Rod. 2022. “Chinese Debt Trap Diplomacy: Reality or Myth?” *Journal of the Indian Ocean Region* 18(3): 250–72. doi:10.1080/19480881.2023.2195280.
- Idris, Muhammad. 2023. “Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Setara Bangun 1.081 Km Tol Di Sumatera.” [Kompas.com](https://money.kompas.com/): 1.
<https://money.kompas.com/read/2023/04/13/105140026/biaya-kereta-cepat-jakarta-bandung-setara-bangun-1081-km-tol-di-sumatera?page=all>.
- Kenepri, Geubrina Reuseuki. 2023. “STRATEGI DEBT TRAP TIONGKOK TERHADAP SRI LANKA DALAM MEMBANGUN HEGEMONI DI ASIA.” <https://jurnal.univrab.ac.id/> Vol 6 No 1: 1–17.
<https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/is/article/view/4008>.
- Pemerintah RI. 2003. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003.” (1): 1–40.
- Sari, Haryanti Puspadan. Pratama Akhdi Martin. 2022. “5 Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak.” <https://money.kompas.com/>.
<https://money.kompas.com/read/2022/07/31/130500126/5-penyebab-biaya-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak?page=all>.
- “Strategi Pemerintah Kelola Utang Negara.” 2012.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2601/Strategi-Pemerintah-Kelola

Utang-Negara.html.

Wibisono, Adhe Nuansa. 2019. "China's 'Belt and Road Initiative' in Sri Lanka: Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment." *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2(2): 222–45. doi:10.33822/mjhi.v2i2.1482.